

## MODEL PEMBERDAYAAN BURUH PEREMPUAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Ahmad Ma'ruf<sup>1</sup>, Masmulyadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Bantul, Yogyakarta 55183 Indonesia, Phone: +62 274 387656

<sup>2</sup> Institute of Public Policy and Economic Studies (INSPECT) Yogyakarta, Jalan Kenari R 13

Sidoarum III, Godean, Sleman, Yogyakarta, 55564 Indonesia, Phone: +62 274 798342,

E-mail korespondensi: macrov\_jogja@yahoo.com

*Naskah diterima: Juli 2012; disetujui: Februari 2013*

**Abstract:** *The purposes of this study are: First, analyze and describe the characteristics of women workers who work at home industry in the province. Second, identify and analyze the strengths, weaknesses, opportunities, and constraints in the empowerment of women workers in the province. Third, exploring the various issues that support and hinder the empowerment of home industry women workers, and Fourth, develop a model of empowerment of women workers in the home industry sector in DIY. This study uses a participatory approach with the main subject of the laborers working in the home industry sector. Focus studies on industrial centers spread across DIY craft. Result of this study are: First, the deepening of the few centers that exist in the DIY industry is dynamics and different characteristics. Second, empowerment of women workers of small industry include the social dimension, the social dimension of education and economy. Third, women's empowerment strategy should take into account the characteristics of workers such as identity, age and duration of workers' education and work in the centers that exist in the location of this study, and Fourth, to realize the empowerment of women workers needed better support the integration of local agencies and institutions of society (civil society), the private sector and educational institutions.*

**Keywords:** *community empowerment; participatory approach; women workers; home industry*

**JEL Classification:** *J20, J23, D1*

**Abstrak:** *Tujuan studi ini, Pertama, menganalisis dan mendeskripsikan karakteristik buruh perempuan yang bekerja di industri rumah tangga di DIY, Kedua, mengetahui dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala dalam pemberdayaan buruh perempuan di DIY, Ketiga, melakukan eksplorasi terhadap berbagai isu yang mendukung dan menghambat pemberdayaan buruh perempuan industri rumah tangga, dan Keempat, menyusun model pemberdayaan buruh perempuan sektor industri rumah tangga di DIY. Studi ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan subyek utama yaitu buruh yang bekerja di sektor industri rumah tangga. Fokus kajian pada sentra-sentra industri kerajinan yang tersebar di DIY. Hasil studi ini ada beberapa hal, yaitu: Pertama, pendalaman terhadap beberapa sentra industri yang ada di DIY memiliki dinamika dan karakteristik yang berbeda-beda, Kedua, pemberdayaan buruh perempuan industri kecil meliputi dimensi sosial, pendidikan dan ekonomi, Ketiga, strategi pemberdayaan buruh perempuan hendaknya mempertimbangkan karakteristik seperti identitas, umur dan pendidikan dan lamanya buruh bekerja di sentra-sentra yang ada dalam lokasi kajian ini, dan Keempat untuk mewujudkan pemberdayaan buruh perempuan diperlukan dukungan keterpaduan baik instansi daerah maupun lembaga-lembaga masyarakat (civil society), swasta dan lembaga pendidikan.*

**Kata kunci:** *pemberdayaan masyarakat; pendekatan partisipatif; buruh perempuan; industri rumah tangga*

**Klasifikasi JEL:** *J20, J23, D1*

## PENDAHULUAN

Seiring dengan semakin meningkatnya beban ekonomi yang dicirikan oleh meningkatnya biaya hidup, pendidikan anak, dan kesehatan memaksa banyak perempuan harus menanggung beban ganda, yaitu di sektor domestik sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus berbagai keperluan keluarga dan di sektor publik sebagai buruh perempuan. Menurut laporan Departemen Tenaga Kerja (2004), kontribusi peran perempuan ditunjukkan dengan semakin meningkatnya angkatan kerja perempuan, yaitu mencapai 46,23 persen.

Perempuan umumnya bergerak di sektor primer (46,01 persen) dan tersier (39,62 persen), namun status pekerjaan terbanyak sebagai buruh sektor informal (54,82 persen), termasuk menjadi pedagang kecil-kecilan, pekerja rumah tangga, bahkan cukup banyak sebagai pekerja keluarga tanpa upah. Kondisi buruh perempuan di sektor formal tidak selalu lebih baik dari perempuan yang berkecimpung di sektor informal (Jurnal Perempuan, Edisi 56, thn 2007). Menurut Sakernas (Februari, 2007) status pekerjaan, perempuan yang bekerja di sektor formal sebanyak 9,1 juta (sebagai pengusaha hanya 5,5 persen dan sisanya 94,5 persen sebagai pekerja/buruh), sedang yang lainnya sebanyak 26,3 juta (74,28 persen) bekerja di sektor informal (berusaha sendiri, berusaha sendiri dibantu pekerja tidak tetap, pekerja bebas di pertanian dan non-pertanian, serta pekerja tak dibayar).

Meskipun sejumlah hak-hak perempuan itu telah dilindungi melalui Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di Indonesia, sebagian besar perusahaan hampir tidak memperhatikan masalah-masalah yang spesifik yang dialami pekerja perempuan. Pekerja perempuan memang jumlahnya cukup besar, namun bukan berarti mempunyai jaminan akan terperhatikannya hak-haknya (Laporan Cedaw, 2007).

Permasalahan yang dihadapi oleh pekerja perempuan terkait dengan hak kesehatan reproduksinya, yakni; (1) Pekerja perempuan di sektor industri dan jasa dengan status pegawai tetap, menurut UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, memiliki hak cuti melahirkan, namun

dalam kenyataannya selama cuti tidak dibayar. Alasannya pekerja perempuan tersebut tidak dapat memperlihatkan akte nikahnya, karena pemilik perusahaan mengaitkan dengan UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan di mana perkawinan yang syah adalah perkawinan yang sudah didaftarkan. Namun hal ini tidak berlaku bagi pasangan yang menikah di wilayah pedesaan, karena hanya 30 persen dari pasangan yang resmi menikah di Indonesia memiliki akte/surat nikah. (2) Pekerja perempuan di perusahaan/pabrik tidak dapat mengambil cuti haid jika tidak dapat membuktikannya dengan surat dokter.

Semangat UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu mengatur hubungan industrial, khususnya di sektor formal. Pertanyaannya kemudian, bagaimana perlindungan buruh perempuan di sektor informal? Pekerja informal sebagaimana UU Ketenagakerjaan adalah mereka yang “bekerja di luar hubungan kerja”, yang berarti tidak ada perjanjian kerja yang mengatur unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Perlu menjadi catatan bahwa struktur perekonomian DIY ditopang oleh jasa; perhotelan, restoran, dan sebagainya termasuk sektor pertanian. Hal ini bisa dipahami bahwa DIY merupakan salah satu destinasi wisata penting di Indonesia setelah Bali dan Jakarta. Sebagai destinasi wisata, pertumbuhan ekonomi disokong salah satunya sektor informal.

Oleh karena itu pemberdayaan buruh perempuan di sektor informal perlu dilakukan dalam rangka untuk menemukan upaya agar buruh perempuan di sektor tersebut dapat terangkat kehidupan sosial-ekonominya. Dalam jangka panjang kesejahteraannya bisa meningkat. Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat,

keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting di sini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya (Bahan Kuliah PPS SP ITB).

Menyadari buruh perempuan di sektor industri rumah tangga yang demikian banyak sementara perlindungan dan perhatian terhadap mereka tidak maksimal maka diperlukan upaya-upaya untuk memperkuat kapasitas mereka. Karena itu studi ini penting dalam rangka memahami karakteristik buruh perempuan di industri rumah tangga dan merumuskan bagaimana model pemberdayaan yang bisa diintervensi oleh pemerintah dan *stakeholders* lainnya.

Secara umum tujuan studi ini yaitu: (1) menganalisis dan mendeskripsikan karakteristik buruh perempuan yang bekerja di industri rumah tangga terpilih, (2) mengetahui dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala dalam pemberdayaan buruh perempuan, (3) melakukan eksplorasi terhadap berbagai isu yang mendukung dan menghambat pemberdayaan buruh perempuan industri rumah tangga, dan (4) menyusun model pemberdayaan buruh perempuan sektor industri rumah tangga pada sentra terpilih.

## METODE PENELITIAN

Studi ini termasuk jenis *policy research* yang terdiri dari rangkaian kegiatan penelitian, sosialisasi dan evaluasi kebijakan yang telah ada selama ini, serta merumuskan kebijakan dan model pemberdayaan buruh perempuan informal di DIY yang efektif dalam menjawab realitas dan kebutuhan yang berkembang di masa yang akan datang. Menurut Muhadjir (2003) *policy research* muncul dari adanya keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Keterbatasan dana, lebih luas lagi menjadi keterbatasan *resource*. *Core policy research* atau penelitian kebijakan adalah mencari pilihan optimal agar *scarcity of resources* dapat diopti-

malkan sebaik mungkin.

Subjek dan partisipan studi ini yaitu buruh perempuan yang bekerja di sektor industri rumah tangga. Buruh perempuan dihubungi melalui kontak, baik itu di tempat tinggal atau pun di tempat kerja mereka oleh tim peneliti yang terlibat dalam studi ini. Lokasi studi ini dilakukan di sentra-sentra industri yang tersebar di beberapa wilayah di DIY, lihat Tabel 1. Sentra kerajinan dipilih sebagai subyek dalam studi ini dengan pertimbangan bahwa, kerajinan merupakan urutan kedua terbesar (jumlahnya mencapai 21.593) setelah pengolahan pangan.

**Tabel 1. Subjek penelitian**

No	Kabupaten/ Kota	Lokasi	Jumlah
1	Yogyakarta	Sentra Batik	5
2	Gunungkidul	Sentra Topeng Kayu	10
3	Kulon Progo	Sentra Serat Alam	10
4	Bantul	Sentra Batik Kayu, Krebet	10
5	Sleman	Sentra Bambu	9
Jumlah			44

Data yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari laporan/publikasi pihak-pihak terkait terutama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, BPS, dan lembaga lain yang memiliki data dan informasi yang relevan. Adapun data-data primer dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode, antara lain: (1) Teknik observasi atau pengamatan, yaitu mengamati langsung ke lokasi pedesaan dan menelusuri sentra-sentra kerajinan untuk mengetahui potensi dan kegiatan yang dilakukan oleh para buruh perempuan. Pengamatan ini menurut Faisal (2003: 65-66) dapat direkam kejadian-kejadian, peristiwa, keadaan yang mempola dari hari ke hari di tengah masyarakat. Aktivitas ini tidak hanya menangkap kenyataan-kenyataan yang terlihat, tetapi juga terhadap yang terdengar; (2) wawancara kepada pihak terkait yaitu pihak pengusaha, buruh perempuan, dan lembaga

lainnya yang terkait. Wawancara ini untuk mendapatkan informasi mengenai relasi buruh majikan, pengupahan, dan *life history* dengan harapan dapat mengamati perubahan-perubahan yang terjadi di sentra; dan (3) diskusi kelompok terfokus (FGD), yaitu diskusi kelompok terfokus yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan buruh perempuan (*stakeholders*), pada FGD ditujukan untuk memperoleh informasi mengenai harapan masa depan, solusi bersama untuk mengatasi masalah buruh perempuan. Menurut Bungin (2003) FGD adalah sebuah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. FGD juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti.

Lebih jauh teknik ini digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap makna-makna intersubyektif yang sulit dimaknakan sendiri oleh peneliti karena dihalangi oleh ketidak-tahuan peneliti terhadap makna sesungguhnya dari orang-orang di sekitar sebuah fenomena yang sedang diteliti serta sejauh mungkin peneliti menghindari diri dari dorongan subyektivitas peneliti tersebut.

Dalam kajian ini, metode analisis yang digunakan mencakup: (1) Analisis Deskriptif (*descriptive analysis*), analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk menyajikan atau mendeskripsikan hasil temuan lapangan. Analisis deskriptif kualitatif khususnya ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang berbagai kondisi lapangan yang bersifat tanggapan dan pandangan terhadap isu utama dalam kajian ini; yaitu mengenai perempuan, perburuhan, upah dan relasi industrial di wilayah riset. Hasil analisis berupa perbandingan kondisi riil di lapangan yang diperoleh dari pendapat-pendapat berbagai unsur yang terlibat langsung dalam perburuhan dengan kondisi ideal yang diperoleh dari *desk* studi (pustaka); (2) Analisis SWOT, analisis ini digunakan untuk

merumuskan secara kualitatif dan holistik baik lingkungan internal maupun eksternal dari entitas yang sedang diamati. Menurut Rangkuti (1998: 18-19) proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, strategi dan kebijakan lembaga. Dengan demikian perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis yang mencakup lingkup internal, analisis akan menjelaskan secara rinci aspek-aspek yang menjadi kelemahan (*weakness*) dan kekuatan (*strength*). Sementara itu, dalam lingkup eksternal analisis ini akan menjelaskan secara rinci mengenai aspek peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*) yang akan dihadapi dalam pemberdayaan buruh perempuan informal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada sub bagian ini akan diuraikan mengenai bagaimana karakteristik dan problematika buruh perempuan di DIY. Karakteristik tersebut menggambarkan secara singkat tentang buruh perempuan mengenai umur, struktur keluarga, status perkawinan dan tingkat pendidikannya. Sedangkan problematika buruh berkaitan dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh para buruh perempuan.

### Analisis SWOT

Salah satu tahapan penting dalam pemberdayaan buruh perempuan yaitu bagaimana menggali atau mengenali permasalahan yang dihadapi oleh buruh perempuan dan berusaha menemukan faktor kunci keberhasilan. Setiap manusia memiliki potensi dan kemungkinan keberhasilannya sendiri-sendiri dengan berbagai karakteristiknya masing-masing. Demikian juga dengan permasalahan yang dihadapi oleh buruh perempuan di sektor informal. Faktor ruang dan waktu serta kebudayaan juga menjadi aspek penting dalam menjelaskan bagaimana intervensi pemberdayaan yang mungkin dilakukan.

Pada bagian ini analisis akan difokuskan pada bagaimana menggali faktor-faktor kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan dalam pengembangan model pemberdayaan buruh perempuan di DIY. Analisis ini disusun

berdasarkan karakteristik dan permasalahan obyektif yang dihadapi oleh para buruh perempuan. Dengan melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh buruh perempuan, maka strategi pengembangannya adalah memanfaatkan peluang dan menyelesaikan tantangan yang dihadapi dunia usaha.

Peluang yang tersedia akan berdampak

positif bagi pemberdayaan buruh perempuan, sementara tantangan yang dihadapi harus diupayakan penyelesaiannya secara sistematis, efektif, efisien, dan optimal. Nampaknya kerjasama dan koordinasi antarpihak berdasar prioritas masalah menjadi sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan dalam pemberdayaan buruh perempuan.

**Tabel 2. Analisis SWOT Buruh Perempuan**

	<b>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</b>	<b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar hukum (UU Ketenagakerjaan) yang jelas.</li> <li>2. Struktur organisasi dan tata kerja BPPM/Dinas Kabupaten/Provinsi.</li> <li>3. Jaringan Ornop/LSM/Ormas DIY.</li> <li>4. Adanya kebijakan politik ketenagakerjaan baik di provinsi maupun nasional.</li> <li>5. Kekayaan sentra industri kerajinan dengan berbagai produk.</li> <li>6. Dukungan perguruan tinggi di DIY.</li> <li>7. Motivasi kerja para buruh.</li> <li>8. Jumlah buruh yang banyak.</li> <li>9. Pengetahuan dan keterampilan yang memadai.</li> <li>10. Tumbuhnya sentra-sentra industri.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya jaminan sosial dan kesehatan buruh.</li> <li>2. Belum terorganisirnya buruh perempuan.</li> <li>3. Rendahnya kesadaran (partisipasi) berserikat dan berlembara buruh perempuan.</li> <li>4. Belum terintegrasinya pendekatan <i>gender mainstreaming</i> dalam hubungan industrial.</li> <li>5. Sistem upah yang belum adil dan bias gender.</li> <li>6. Lemahnya posisi tawar (<i>bargaining position</i>) terhadap majikan.</li> <li>7. Kecilnya dukungan anggaran program kegiatan.</li> <li>8. Lemahnya koordinasi lintas sektoral/tingkatan birokrasi.</li> <li>9. Keterampilan.</li> </ol>
<b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b>	<b>Strategi S - O</b>	<b>Strategi W - O</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kebijakan politik (ketenagakerjaan) nasional dan lokal.</li> <li>2. Program-program pemberdayaan/prorakyat ditingkat nasional dan lokal.</li> <li>3. Tumbuhnya kesadaran buruh ditingkat nasional terhadap isu-isu relasi industrial.</li> <li>4. Perkembangan perdagangan ekspor produk kerajinan.</li> <li>5. Program pengembangan desa wisata oleh Provinsi/Kabupaten/Kota DIY.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar Hukum yang jelas, Dukungan APBD serta kebijakan politik pemerintah Provinsi DIY untuk memberdayakan buruh perempuan merupakan modal utama bagi BPPM DIY/Dinas Kabupaten untuk membangun kesadaran buruh terhadap hubungan industrial.</li> <li>2. Jaringan ornop/LSM/Ormas, kekayaan sentra industri, dukungan perguruan tinggi untuk menangkap peluang program-program pemerintah yang prorakyat dalam bentuk kerja-kerja pendampingan, dan dukungan sumberdaya.</li> <li>3. Peningkatan kapasitas buruh melalui buruh melalui latihan keterampilan diversifikasi kreasi produk kerajinan untuk memanfaatkan peluang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya jaminan sosial dan kesehatan, belum terintegrasinya pendekatan <i>gender mainstreaming</i> dalam hubungan industrial untuk memaksimalkan dukungan kebijakan politik terhadap pemberdayaan buruh perempuan.</li> <li>2. Optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesadaran gender, pentingnya berserikat/organisasi bagi buruh perempuan.</li> <li>3. Memperkuat koordinasi baik diantara pemerintah Provinsi dengan Kabupaten, juga termasuk lembaga-lembaga non pemerintah.</li> <li>4. Pembinaan dan optimalisasi pihak swasta yang sudah ada.</li> <li>5. Pembentukan dan optimalisasi</li> </ol>

	perkembangan perdagangan.	kelembagaan buruh perempuan melalui pendampingan di luar jam kerja.
	4. Optimalisasi kemitraan perguruan tinggi, Ornop/LSM/ Ormas dalam pendampingan sentra-sentra kerajinan dan buruhnya.	
	5. Optimalisasi kelembagaan sosial, pendidikan, ekonomi yang sudah eksis.	
Ancaman ( <i>Threats</i> )	Strategi S - T	Strategi W - T
1. Pemutusan hubungan kerja.	1. Optimalisasi komunikasi dan informasi bagi buruh perempuan terkait hak-hak dasarnya (jaminan sosial, kesehatan reproduksi).	1. Meningkatkan kesadaran gender buruh perempuan di lingkungan (sentra) kerja.
2. Tenaga kerja luar daerah.	2. Peningkatan daya saing dan daya tahan menghadapi dinamika liberalisasi perburuhan.	2. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai kelembagaan buruh dalam meningkatkan keberdayaan buruh perempuan.
3. Pasar bebas (liberalisasi) pasar tenaga kerja.	3. Optimalisasi peran mediasi baik oleh pemerintah Provinsi/ Kabupaten / Ornop dalam membangun hubungan buruh dengan majikan.	3. Peningkatan/pemberdayaan kelembagaan buruh melalui pendampingan.
4. Kebijakan industri (majikan) yang tidak mendukung.		
5. Perbedaan kepentingan antara buruh dan majikan.		

Sumber: Data Primer Diolah, (2012)

### Model Pemberdayaan Buruh Perempuan

Kegiatan pemberdayaan buruh perempuan di sektor industri rumah tangga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas kehidupan buruh perempuan yang bekerja pada sektor informal, perluasan jaminan sosial buruh, standarisasi upah minimum dalam rangka mencapai hasil akhir yaitu meningkatnya kesejahteraan rakyat.

Strategi pemberdayaan buruh perempuan sektor industri rumah tangga di DIY mengacu kepada agenda pokok, yaitu:

- (a) Mendorong partisipasi dan pelibatan peran serta masyarakat (Ornop/Ormas) dalam pemberdayaan buruh perempuan di sektor industri rumah tangga.
- (b) Mendorong sektor swasta dan perguruan tinggi (*partnership*) dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan buruh perempuan di sektor industri rumah tangga.
- (c) Pengembangan alternatif usaha bagi buruh yang memiliki keinginan untuk mandiri atau alir profesi melalui penguatan modal dan pendampingan.
- (d) Jaminan sosial dan perlindungan hukum

bagi buruh perempuan di sektor industri rumah tangga.

Agar program-program yang akan dilakukan oleh birokrasi berjalan efektif dan muncul rasa "*ownership*" terhadap program, maka sebaiknya sejak awal para pemangku kepentingan dilibatkan dalam setiap tahapan program dan kegiatan. Pemangku kepentingan dalam pemberdayaan buruh perempuan tidak hanya *state*, melainkan juga sektor swasta dan masyarakat sipil (*civil society*). Tabel 3 menggambarkan bagaimana keterkaitan peran antar pihak dalam pemberdayaan buruh perempuan.

#### 1) Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan

Strategi dan kebijakan pemberdayaan buruh perempuan di sektor informal haruslah mampu memperkuat kelembagaan buruh perempuan, mengembangkan *partnership* dengan berbagai institusi dan mengarah pada perlindungan hak-hak buruh perempuan di sektor industri rumah tangga. Karena itu strategi dan kebijakan pemberdayaan perempuan informal dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi program. Langkah ini memungkinkan untuk memberdayakan para buruh

perempuan yang bekerja di sektor informal di DIY.

Intensifikasi program yaitu pengembangan program pada peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan buruh perempuan yang sudah ada, melalui kemitraan dengan sektor swasta, perguruan tinggi, jaminan sosial, dan pendampingan.

Sementara ekstensifikasi program pengembangan merupakan upaya mencari terobosan baru dalam pemberdayaan buruh perempuan di sektor informal sesuai dengan karakteristik yang dimiliki masing-masing kawasan/sentra.

Strategi dan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan mandat dari UU No. 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah lainnya sekaligus memperhatikan agenda-agenda pembangunan yang memberikan porsi dan perhatian terhadap keberdayaan perempuan, program pengembangan tersebut mencakup:

(a) Pengawasan dinas/dewan terkait untuk memastikan berbagai peraturan (ketenagakerjaan) dijalankan oleh para pihak. (b) Pengembangan sistem pengupahan yang adil (tidak diskriminatif) antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja. (c) Pengembangan organisasi atau

asosiasi (kelembagaan) buruh sebagai wadah pembinaan dan pengembangan potensi buruh perempuan. (d) Pengembangan kapasitas dan jejaring kelembagaan antar *stakeholders*. (e) Afiriasi kebijakan anggaran terhadap pembinaan dan pengembangan organisasi buruh. (f) Optimalisasi peran sektor swasta dan perguruan tinggi dalam pendampingan buruh perempuan di sektor informal. (g) Pengembangan *task force*/kelembagaan pemberdayaan buruh perempuan yang khusus men-*drive* isu-isu pemberdayaan buruh perempuan di BPPM, DIY, dan Kabupaten.

## 2) Program Pengembangan Buruh Migran

Program pengembangan kegiatan pemberdayaan buruh perempuan meliputi beberapa aspek, antara lain:

(a) *Sosial*. Jumlah buruh yang demikian banyak dan tersebar di berbagai sentra-sentra kerajinan merupakan potensi yang luar biasa. Hanya saja belum terwadahi dalam kelembagaan, yang sesungguhnya dalam undang-undang ketenagakerjaan, asosiasi atau serikat buruh diafirmasi. Persoalan utama yang menjadi kendala yaitu jam kerja yang sangat padat yang tidak memungkinkan bagi buruh untuk secara lebih

**Tabel 3. Pembagian peran stakeholder dalam pemberdayaan buruh perempuan**

No	Para Pihak	Peran Serta/Partisipasi
1.	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan berbagai lembaga/dinas terkait.</li> <li>- Kebijakan politik untuk memberikan perlindungan sosial dan hukum bagi buruh perempuan yang bekerja di industry rumah tangga.</li> <li>- Optimalisasi KIE - komunikasi, informasi &amp; edukasi - terkait jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).</li> <li>- Pengawasan dinas/dewan terkait untuk memastikan berbagai peraturan (ke-tenagakerjaan) dijalankan oleh para pihak.</li> <li>- Alokasi budget melalui APBD untuk pembinaan dan pendampingan buruh.</li> <li>- Mediasi konflik-konflik terkait hubungan majikan-buruh.</li> </ul>
2.	Masyarakat sipil ( <i>civil society</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan (di luar jam kerja) dan pengorganisasian buruh perempuan.</li> <li>- Peningkatan kapasitas buruh perempuan melalui berbagai pelatihan/<i>workshop</i>.</li> <li>- Peningkatan kesadaran hak-hak buruh melalui KIE.</li> </ul>
3.	Sektor swasta dan perguruan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan CSR dalam pengembangan program-program pemberdayaan buruh perempuan seperti permodalan dan dukungan sumberdaya (peralatan) lainnya.</li> <li>- Pelibatan perguruan tinggi dalam berbagai pendampingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat, dan penelitian.</li> </ul>

longgar melibatkan diri dalam organisasi buruh.

Banyaknya lembaga-lembaga sosial dan Ornop (baca: *civil society*) di DIY juga merupakan potensi dalam upaya mendorong pemberdayaan buruh perempuan melalui pelibatan berbagai lembaga tersebut dalam kegiatan-kegiatan pendampingan sosial-budaya.

Buruh perempuan yang bekerja di sektor informal seringkali terlupakan dengan jaminan sosial dan kesehatan yang memungkinkan para buruh bisa hidup sejahtera. Oleh karena ini perlu adanya dorongan kepada berbagai perusahaan/pengrajin untuk memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan sosial buruh perempuan melalui perlindungan/jaminan sosial tenaga kerja.

**(b) Pendidikan.** Pendidikan merupakan aspek penting dalam pemberdayaan buruh perempuan. Bukan hanya pendidikan formal, tetapi melalui sejumlah pendidikan non-formal, yaitu pelatihan dalam meningkatkan kapasitas buruh sesuai dengan karakteristik industri tempatnya bekerja.

Pendidikan penyadaran hak-hak buruh yang dijamin oleh berbagai konvensi internasional dan hukum perburuhan secara nasional secara "kritis", di samping kesadaran tentang kondisi sosial, budaya dan ekonomi yang bisa ditempuh lewat media massa, pelatihan, pendidikan hukum dan pendapat umum.

### 3) *Ekonomi*

Strategi program pemberdayaan buruh perempuan dalam aspek ekonomi meliputi beberapa hal, yaitu:

**(a) Access to capital**, artinya bagaimana para *stakeholders* memfasilitasi buruh yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk mandiri/mencari (alternatif nafkah yang lain) dengan sumber-sumber permodalan seperti perbankan, koperasi atau asuransi.

**(b) Akses kepada keadilan;** buruh perempuan seringkali memperoleh diskriminasi dan ketidakadilan dalam kehidupan sosial-ekonomi politiknya. Dalam hubungannya dengan ketenagakerjaan, dukungan paralegal dan advokasi terhadap hak-hak yang meliputi cuti haid, cuti hamil, serta melahirkan. Beberapa perlindungan lain yang tidak berhubungan dengan kondisi

biologisnya misalnya bekerja pada malam hari, pengupahan yang sama (laki-laki dan perempuan), dan pekerjaan yang bisa membahayakan bagi buruh perempuan.

## SIMPULAN

Hasil analisis yang dilakukan berdasarkan data sekunder dan data primer yang tersedia mengenai Model Pemberdayaan Buruh Perempuan dapat dirangkum beberapa catatan akhir yang perlu menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan, yaitu:

**(1)** Pendalaman terhadap 5 sentra yang ada di DIY yaitu Kreet, Bantul; Tanggulangin, Kulon Progo; Brajan, Sleman; Ketanggungan, Yogyakarta; dan Bobung, Gunungkidul memiliki dinamika dan karakteristik yang berbeda-beda.

**(2)** Pemberdayaan buruh perempuan industri kecil meliputi dimensi sosial, pendidikan dan ekonomi. Pada dimensi sosial dengan mendorong tumbuhnya kelembagaan/asosiasi sebagai wadah pembinaan dan pengorganisasian buruh. Dimensi pendidikan berkaitan dengan peningkatan kapasitas buruh perempuan, termasuk yang memiliki keinginan untuk mengembangkan kemandirian atau bertransformasi kepekerjaan lain, dan pada dimensi ekonomi yaitu pemberian akses kepada permodalan dan keadilan (*access to justice*).

**(3)** Strategi pemberdayaan buruh perempuan hendaknya mempertimbangkan karakteristik seperti identitas, umur dan pendidikan dan lamanya buruh bekerja di sentra-sentra yang ada dalam lokasi kajian ini.

**(4)** Untuk mewujudkan pemberdayaan buruh perempuan diperlukan dukungan keterpaduan baik instansi daerah maupun lembaga-lembaga masyarakat (*civil society*), swasta dan lembaga pendidikan.

**Saran.** Adapun saran yang bisa direkomendasikan dalam studi ini, yaitu: (1) Peningkatan kesejahteraan buruh perempuan melalui pemberian jaminan sosial dan kesehatan (hak-hak reproduksi) haruslah menjadi perhatian dalam keseluruhan rangkaian program.

(2) Perlu adanya kesamaan persepsi, komitmen, dan kebijakan dalam pemberdayaan buruh perempuan di sektor informal akan mampu



memberikan ruang akomodasi bagi aspirasi, kreativitas, dan inovasi yang berkembang yang diharapkan akan dapat memperkuat keberdayaan buruh perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2001). *Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan, intervensi komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Adimiharja, Kusnaka dan Hikmat, H. (2003). *Participatory research appraisal*. Bandung: Penerbit Humaniora.
- Djohani, Rianingsih (ed). (1996). *Berbuat bersama berperan setara, acuan penerapan participatory rural appraisal*. Kupang: Driyamedia.
- Dahniar dan Lasimpo, Danel. (2008). *Menebar dana menuai kemiskinan: PPK Bank Dunia di Sulawesi Tengah*. Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development.
- Dewanti, Ratih dan Chotim, Erna Ermawati. (2004). *Marginalisasi dan eksploitasi perempuan usaha mikro di pedesaan Jawa*. Bandung: Akatiga.
- Faisal, Sanapiah. (1995). *Format-format penelitian sosial: Dasar-dasar dan aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fernandes, Walter dan Tandon, Rajesh. (1993). *Riset partisipatoris riset pembebasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hikmat, Harry. (2001). *Strategi pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Hardyastuti, Suhatmini dan Hidayana, Bambang. (1991). *Pekerja wanita pada industri rumah tangga sandang di Provinsi DIY*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Kusumanto, dkk. (2006). *Belajar beradaptasi bersama-sama mengelola hutan di Indonesia*. Bogor: Centre for International Forest Research.
- Legowo, Joko dkk. (2011). *Kapitalisme perikanan dan advokasi buruh di Jepara*. Jepara: Yayasan Pamerdi Luhur.
- McIntosh, P. (2010). *Action research and reflective practice*. London: Routledge.
- Rangkuti, Freddy. (1998). *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sajogyo, dkk. (1997). *Gerakan nasional penanggulangan kemiskinan: kajian bersama pengembangan kebijakan*. Yogyakarta: Bappenas - P3R Yayasan Agro Ekonomika dan Aditya Media.
- Sumodiningrat, Gunawan. (2002). *Pemberdayaan sosial kajian ringkas tentang pembangunan manusia Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sukendar, Ananto. (1999). *Profil sosial dan problematika pekerja rumah tangga di DIY*. Yogyakarta: Yayasan Tjoet Njak Dien.
- Susilastuti, Dewi Haryani, dan Partini. (1990). *Sistem borongan wanita pekerja di pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan UGM.
- Verhagen, Koenraad. (1996). *Pengembangan swadaya, pengalaman LSM di tiga negara*. Jakarta: Puspaswara.